

EVALUASI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU

Petrus Ans Gregorius Taek¹, Adeo Dato Januario Barros Mbiri²

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fajar Timur, Atambua, Indonesia^{1,2}*

E-mail: Petrusgregorius87@gmail.com

ABSTRAK

Penyebab menurunnya partisipasi Masyarakat Kabupaten Belu dalam pemilu serentak tahun 2024 salah satunya adalah masalah administrasi/dokumen pemilih yang tidak lengkap sehingga banyak pemilih tidak memberikan hak suaranya. Untuk mengatasi hal ini maka para pemangku kepentingan perlu bekerja ekstra agar kepemilikan dokumen negara itu dapat secara mudah diperoleh dengan protocol yang sederhana mengingat mental instan generasi x, y dan z di jaman ini. Penelitian kualitatif eksploratif ini menggunakan teknik purposif sampling untuk menentukan lokasi penelitian dan informan. Fokus penelitian berupaya untuk mengkaji dan mengetahui penyebab turunnya angka partisipasi masyarakat Kabupaten Belu dalam pemilu tahun 2024. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, rekaman arsip, wawancara mendalam, observasi langsung dan focus group discussion (FGD). Sedangkan untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara Credibility, Transferability, Dependability dan Confirmability. Analisis data menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman yaitu data collection, data condensation, data display dan conclusions. Tujuan serta hasil penelitian ini merekomendasikan KPU Kabupaten Belu dan seluruh stakeholder terkait untuk serius melakukan pelayanan administrasi yang tertib dan humanis serta sosialisasi kesadaran kepemilikan dokumen negara secara terus-menerus, meningkatkan kerjasama dan komunikasi dgn Dukcapil, Babinsa-Babinpolek untuk menggerakkan masyarakat dalam mengurus dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain sebagainya, sosialisasi yang intens agar masyarakat tidak terjerat money politik dan perlunya anggaran khusus bagi kaum difabel seperti sosialisasi khusus.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih, Pemilu Serentak

ABSTRACT

One of the causes of the decline in community participation in Belu Regency in the 2024 simultaneous elections is the problem of incomplete voter administration/documents so that many voters do not cast their votes. To overcome this, stakeholders need to work extra hard so that ownership of state documents can be easily obtained with a simple protocol considering the instant mentality of generations x, y and z in this era. This exploratory qualitative research uses purposive sampling techniques to determine the research location and informants. The focus of the research seeks to examine and determine the causes of the decline

in community participation in Belu Regency in the 2024 elections. Data collection techniques through documentation, archival recordings, in-depth interviews, direct observation and focus group discussions (FGD). Meanwhile, to test the validity of the data, it is done by means of Credibility, Transferability, Dependability and Confirmability. Data analysis uses the Analysis Interactive Model from Miles and Huberman, namely data collection, data condensation, data display and conclusions. The purpose and results of this study recommend that the Belu Regency KPU and all related stakeholders seriously carry out orderly and humanistic administrative services and continuously socialize awareness of state document ownership, improve cooperation and communication with Dukcapil, Babinsa-Babinpol to mobilize the community in taking care of KTP, KK, Birth Certificates, Death Certificates and so on, intensive socialization so that the community is not caught in money politics and the need for a special budget for people with disabilities such as special socialization.

Keywords: *Participation, Voters, Simultaneous Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum tahun 2024 adalah moment pesta demokrasi yang paling meriah karena digelar serentak di seluruh Indonesia. Perhelatan akbar ini mengikutsertakan ribuan Warga Negara Indonesia dari berbagai partai politik di seluruh tanah air. Ada nilai positif yang dapat dipetik dari peluang ini bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi setiap periode tahun politik berarti warga Indonesia semakin sadar bahwa NKRI membutuhkan warganya untuk membangun tanah airnya secara jujur, adil, akuntabel dan merata. Selain itu, perwujudan pemilu serentak dilakukan demi memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kualitas nilai-nilai demokrasi dan mengurangi dampak konflik social di tengah masyarakat atau ketidakstabilan politik serta meminimalisir penggunaan anggaran APBN. (Muh Afit Khomsani, 2024)

Catatan pemilu presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Tahun 2024, ada penurunan partisipasi pemilih yang mencapai 81,78%. Jumlah ini lebih kecil dibanding pemilu 2019 dimana tingkat partisipasi mencapai puncaknya sebesar 81,97%. Tingkat partisipasi pemilu mengalami naik turun dari tahun 2004 dengan 79,76%, menurun di tahun 2009 menjadi 74,81%, terus menurun pada tahun 2014 menjadi 69,78%, namun meningkat kembali pada Pilpres 2019 sebelum mengalami penurunan tipis pada tahun 2024. (Yesidora, 2024).

Di sisi lain, proses pengumpulan dan perhitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) telah berjalan dengan lancar. Didiri oleh 1.556 calon kepala daerah dan mengundang lebih dari 203 juta pemilih, Pilkada 2024 dinilai berlangsung dengan tertib, lancar dan aman (Kompas,

2024). Meski begitu, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang lalu (Arini, 2024).

Konsep partisipasi dalam pemilu yang berkembang di tengah masyarakat sebenarnya telah dimaknai secara dangkal dimana partisipasi dalam pemilu hanya diukur lewat hasil pencoblosan di TPS dan kemudian menganalisis jumlah pemilih dengan DPT. Konsep dangkal ini kemudian dikembangkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu bahwa partisipasi dalam demokrasi termasuk upaya mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah, menjadi penyelenggara pemilu, actor kompetisi partai politik, menjadi anggota sah partai, mengurus dinamika partai politik, ikut menganalisis fenomena politik dan mempublikasikan hasil pemilu secara jujur. (Aditya Perdana, 2024)

Kabupaten Belu merupakan kabupaten di perbatasan Timor Leste yang juga mengalami *los control participation* sama seperti beberapa wilayah Indonesia karena beberapa fenomena politik yang sangat mempengaruhi atau sangat berdampak bagi kehidupan sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, ekonomi, budaya, pengelolaan wilayah perbatasan, pariwisata, perbaikan sarana dan prasarana, air bersih, penataan UMKM local, kebersihan lingkungan, bansos dan lain sebagainya. Dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Belu 2024, fenomena figure calon bupati yang sangat peduli terhadap kemajuan aspek-aspek kehidupan sosial di atas tidak satu pun direstui oleh masyarakat kebanyakan karena dari 4 (empat) paslangan calon yang berkompetisi, 2 (dua) paslon adalah figure lama yang telah dikenal masyarakat dengan rekam jejak kurang memuaskan. Sedangkan dua paslon baru belum dikenal oleh masyarakat luas. Banyak Masyarakat Belu yang kemudian memilih berdiam diri alias tidak begitu sibuk dengan pesta demokrasi tahun 2024 karena memilih dan tidak memilih adalah sama saja karena kekecewaan terhadap pola kerja mereka tidak sedikitpun merubah wajah pembangunan di Rai Belu.

Menurut (Hutama et al., 2021) kepribadian calon politikus mempunyai kekuatan akbar dan pengaruh yang signifikan terhadap strategi politik yang digunakan dalam pemilihan. Sebagai komoditas unggulan partai, figur ini menjadi simbol utama yang diberikan partai kepada masyarakat. Artinya bahwa figure politik yang ditawarkan tiap-tiap DPC partai politik di Belu sudah sesuai keputusan partai dan tidak ada lagi calon lain seperti yang diharapkan Masyarakat Belu. Jika masyarakat tidak mau memilih calon yang disahkan oleh KPU Belu itu adalah hak mereka dan tidak ada intervensi hukum yang dapat memberikan sanksi hukum jika warga negaranya tidak ikut memilih dalam pesta demokrasi. Pada dasarnya

kepribadian para calon kandidat politik tentu memiliki pengalaman professional tentang berpolitik yang benar dan mampu memainkan peran manajemen dalam berbagai partai politik dan keahlian mereka sudah tidak diragukan lagi karena banyak berkecimpung dalam dunia politik.

Data partisipasi politik Masyarakat Belu seperti yang dipaparkan dalam diagram batang berikut:



Sumber: KPU Kab. Belu 2024

Adapun untuk data tersebut dituangkan dalam tabel.1, sebagai berikut:

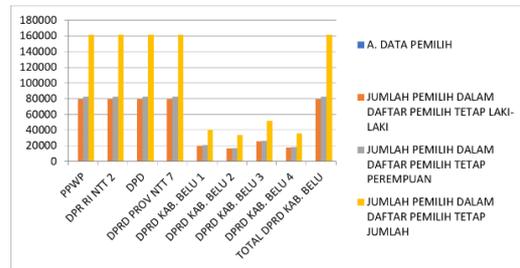
Tabel.1
Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

DATA PEMILIH	PPWP	DPR RI NTT 2	DPD	DPRD Provinsi NTT 7	DPRD Kab. Belu 1	DPRD Kab. Belu 2	DPRD Kab. Belu 3	DPRD Kab. Belu 4	Total DPRD Kab. Belu
Data Pemilih									
Jumlah Pemilih Laki-laki	79.000	79.000	79.000	79.000	19.794	16.515	25.314	17.377	79.000
Jumlah Pemilih Perempuan	82.304	82.304	82.304	82.304	20.760	17.125	26.153	18.266	82.304
Jumlah DPT	161.304	161.304	161.304	161.304	40.554	33.640	51.467	35.643	161.304
Pengguna Hak Pilih									
Jumlah Laki-laki	49.774	49.693	49.699	49.668	12.896	10.401	15.418	10.819	49.534
Jumlah Perempuan	57.157	57.103	57.104	57.084	14.644	11.767	17.839	12.759	57.006
Jumlah DPT	106.931	106.796	106.803	106.752	27.540	22.168	33.257	23.578	106.540

Sumber : KPU Kab. Belu 2024

Jumlah pemilih tetap dalam data di atas hanya sebanyak 161.304 dari keseluruhan total jumlah penduduk Kabupaten Belu sebanyak 231.008

(Belu, 2023), dimana dalam pemilu serentak ini tingkat partisipasi laki-laki lebih menunjukkan tren penurunan dibanding pemilih perempuan. Partisipasi DPT laki-laki hanya sebanyak 49.534 dari total DPT 79.000 atau sekitar 70 % saja. Sedangkan partisipasi DPT Perempuan lebih maksimal sebanyak 57.006 dari total 82.304 atau sekitar 80 %. Penyebab pemilih laki-laki tidak ikut mencoblos dalam pemilu serentak tahun 2024 adalah alasan kurang mengikuti sosialisasi dari KPU dan alasan pekerjaan atau merantau keluar daerah/pulau/luar negeri dan tidak memiliki akses untuk pulang sehingga terjadi penurunan partisipasi.



Presentasi data di atas dapat digambarkan bahwa jumlah DPT sebanyak 161.304 namun tingkat partisipasi masyarakat hanya sebanyak 63% atau sekitar ± 59.600 DPT tidak ikut memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan terkait sejumlah besar Warga Belu tidak ikut mencoblos akan diuraikan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

Kalangan pengamat politik di Belu dan kabupaten tetangga (Kab. Malaka dan Kab. TTU) menilai bahwa

ada kesalahan teknis dalam pola sosialisasi yang diselenggarakan pihak berwenang yang kurang melibatkan masyarakat di lokasi terpencil yang akumulasinya hampir mendekati jumlah DPT di wilayah perkotaan. Selain itu juga ada permasalahan terkait pelayanan administrasi dokumen kewarganegaraan yang sangat lambat di wilayah terisolasi sehingga konsekwensi golput dan kehilangan hak memilih harus menjadi perhatian negara, terkhusus para stakeholder yang ada di wilayah kekuasaan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Efriza, 2017); ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama adalah struktur kepribadian seseorang, yang tercermin dalam sikap mereka secara pribadi. Konteks perhelatan dan perlombaan politik para actor pemilu di Belu telah menampilkan figure-figure politik yang sangat berkompeten dan tangguh dalam memperjuangkan aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) nya masing-masing. Secara professional para figure yang dicalonkan partainya masing-masing telah menunjukkan semangat pembangunan lewat janji-janji politisnya lewat kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Itu artinya kepribadian mereka telah dikenal oleh para calon konstituennya yang selanjutnya mereka akan dipilih oleh masyarakat sesuai hati nuraninya. Jika kepribadian para calon figure kurang menarik maka masyarakat juga

tidak tertarik untuk memilih mereka atau lebih memilih golput.

Kedua, lingkungan sosial politik tidak langsung mencakup struktur seperti media massa, politik, ekonomi, dan budaya. Artinya factor lingkungan sosial sangat menentukan masyarakat dalam memilih. Jika lingkungan sosial tidak nyaman seperti diteror oleh tetangga atau keluarga inti/batih jika berbeda pilihan maka ada kemungkinan masyarakat lebih memilih diam atau golput dari pada menimbulkan konflik batin setelah mencoblos di TPS.

Ketiga, aktor dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan mereka. Budaya politik yang berkembang di Kabupaten Belu masih terkesan budaya politik parokial dimana masyarakatnya masih acuh tak acuh terhadap aspek politik yang kian hari kian memanas. Sebagian besar Masyarakat Belu adalah masyarakat agraris sehingga mereka kurang peduli bahkan tidak tertarik sama sekali dengan politik karena tidak ada hubungannya dengan profesi mereka. Ada slogan atau prinsip yang dipegang oleh masyarakat yaitu “hidup dan kehidupan Orang Belu tidak bergantung pada pemerintah” artinya mereka makan tidak tunggu pemberian dari pemerintah tetapi dapat dihasilkan dari pertanian dan peternakan yang dikembangkan secara mandiri. Konsekuensinya adalah masyarakat tidak merasa rugi jika mereka golput.

Keempat, dasar sikap fungsional: kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Budaya Orang Belu yang sangat menghargai tamu atau orang yang memiliki jabatan/struktur sosial yang lebih tinggi dimana hal ini tampil dalam diri para figure/calon politikus yang dijagokan di Dapilnya masing-masing. Jika para calon telah berkunjung ke kediaman pribadi atau berkunjung ke lingkungan kampung/dusun masyarakat maka sudah pasti masyarakat akan jatuh hati ke figure bersangkutan. Tetapi blusukan ini belum tentu berhasil karena masyarakat semakin hari semakin cerdas memilih dan memilah mana figure yang sungguh-sungguh berjuang dan berkorban demi rakyat. Selain itu masyarakat juga mudah dikacaukan persatuannya dengan fenomena *money politic*. Jika ada tawaran yang lebih menjanjikan maka mereka dengan mudah terprovokasi.

Selain itu gaya berkomunikasi menurut (Prasetyo, 2014) juga sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dimana para calon politikus diharapkan mempunyai skill komunikasi mengendalikan dan gaya komunikasi dua arah. Komunikasi mengendalikan artinya bahwa gaya menyampaikan janji politik yang membatasi, memaksa, mengatur perilaku bawahan. Dalam setiap kampanye atau pendekatan kepada calon konstituennya diharapkan dapat dengan tegas memberikan janji politik yang tidak membias dan tidak diragukan lagi dan akan ditepati

sehingga semangat calon konstituenya untuk memilih calon figure tidak mendua hati. Komunikasi dua arah artinya selain pendekatan melalui kampanye public, sang calon politikus harus mampu blusukan ke tengah-tengah masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan sehingga para calon konstituen merasa bahwa orang yang akan dipilih benar-benar merakyat dan mengerti kebutuhan mereka.

Data yang disajikan oleh (Setiawan & Djafar, 2023) menunjukkan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milineal adalah pemilih yang terbanyak dengan jumlah mencapai sekitar 53-55%. Hal ini menampilkan sisi berbeda terhadap generasi X atau Gen X (kelahiran tahun 1965-1980) yang mengalami penyusutan partisipasi politiknya. Menurun tipis 5 % terhadap partisipasi generasi Z atau Generasi Alpha (kelahiran tahun 2013-2025), generasi Z atau Gen Z (kelahiran tahun 1997-2012). Penyebab dari menurunnya partisipasi gen x dalam pemilu serentak 2024 tentu menjadi fenomena unik yang tentu sementara diteliti oleh sejumlah pihak untuk dicarikan solusinya.

Hasil penelitian (Rastami & Halking, 2023) merujuk pemerintah dalam hal ini KPU RI perlu meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Situasi dinamika pemerintahan dalam lembaga KPU Belu perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat akan

pentingnya politik menjadi meningkat. Dalam FGD pada tanggal 21 Februari 2025 di Hotel Nusantara II Atambua-Belu dijelaskan secara detail soal ketersediaan dana sosialisasi yang cukup yang dimiliki KPU Belu dan telah dilakukan sosialisasi mulai dari sekolah SMA, kampus, melalui kerja sama dengan LSM-LSM dan pemerintah desa tetapi hasilnya belum memuaskan. Tingkat partisipasi masyarakat masih belum stabil meskipun telah didata oleh Tim Pantarli KPU Belu.

Lebih lanjut (Rahmiyati Mii, 2023) mengusulkan kepada pemerintah bahwa Adanya struktur politik dan institusi di tingkat masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media masa yang kritis dan aktif, dapat menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam kehidupan politik. Para calon pejabat pemerintah dan partai pengusungnya di Belu perlu sekali mengaktifkan kesadaran sosialnya betapa pentingnya mendidik masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik untuk meningkatkan partisipasi politik serta memberikan tekanan yang signifikan kepada mereka yang memegang kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan dengan tanggung jawab demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat dan golongan tanpa kecuali.

Di kutib dari (Fadillah, 2024) dalam pemberitaannya menjelaskan penyebab menurunnya partisipasi

masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 antara lain; *pertama*; Kejenuhan Pemilih. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi adalah kelelahan pemilih akibat seringnya pemilihan umum dalam waktu dekat. Masyarakat baru saja menyelesaikan pemilu presiden dan legislatif, sehingga merasa lelah untuk kembali berpartisipasi dalam Pilkada. Fenomena ini dikenal sebagai *voter fatigue*, di mana pemilih merasa jenuh dan kehilangan minat untuk menggunakan hak suaranya.

Kedua; Kurangnya Ketertarikan pada Kandidat. Banyak pemilih merasa bahwa kandidat yang bertanding kurang menarik atau tidak kompetitif, yang menyebabkan apatisme terhadap proses pemilihan. Hal ini diperparah oleh pandangan bahwa pemimpin daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari mereka dibandingkan dengan kebijakan nasional.

Ketiga; Biaya dan Aksesibilitas. Tingginya biaya untuk mencalonkan diri juga menjadi penghalang bagi calon potensial yang dapat mengurangi kualitas kandidat yang tersedia untuk dipilih. Selain itu, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang kurang strategis dapat menyulitkan pemilih untuk memberikan suara mereka.

Keempat; Sosialisasi yang Kurang Efektif. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan sosialisasi, banyak pihak berpendapat bahwa pendekatan tersebut tidak cukup

inovatif, terutama dalam menjangkau generasi muda melalui platform digital. Hal ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih modern dan menarik.

Catatan (Arini, 2024) dari Badan Keahlian Parlemen DPR RI menyebut rendahnya partisipasi pemilih pada suatu pemilihan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu faktor politik itu sendiri, faktor institusional penyelenggaraan pemilu, dan faktor aksesibilitas. Hampir dipastikan bahwa *pertama*; menurunnya partisipasi masyarakat pemilih di Kabupaten Belu disebabkan oleh motivasi/kesukaan terhadap calon yang tidak sesuai keinginan masyarakat. *Kedua*; jadwal pemilu yang berdekatan, durasi kampanye yang singkat, dan rendahnya pengenalan terhadap calon kepala daerah (Nastitie, 2024). *Ketiga*; soal aksesibilitas. Masyarakat Belu yang sebagian besarnya bekerja di sector swasta yang kebetulan berada di luar daerah sulit untuk pulang kampung untuk mencoblos dikarenakan tidak memiliki biaya transportasi dan ijinan dari majikannya.

Jika disimpulkan dari beberapa literature penelitian terdahulu dapat disimpulkan dalam gambar 1 berikut:



Gambar.1 Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilu Tahun 2024

METODE

Pendekatan secara kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode eksploratif dimana data dan informasi yang diperoleh dari para informan menjadi rujukan agar dapat memperoleh gambaran umum yang holistik mengenai penyebab menurunnya partisipasi masyarakat Kabupaten Belu dalam pemilihan umum serentak tahun 2024.

Studi ini dilakukan dari awal November 2024 hingga akhir Februari 2025. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, dan empat informan digunakan sebagai responden. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan lokasi penelitian. Artinya, karakteristik tertentu ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian dan diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. KPU Kabupaten Belu dipilih khusus karena lembaga ini yang memiliki data pemilu paling akurat dan juga tempat yang menampung banyak informasi administrasi maupun permasalahannya serta sumber informasi tentang pemilihan umum dan dinamika demokrasi di Indonesia.

Fokus penelitian berupaya untuk mengkaji dan mengetahui penyebab turunnya angka partisipasi masyarakat Kabupaten Belu dalam pemilu tahun 2024. Metode untuk mendapatkan sumber data termasuk pencarian dan identifikasi informan serta foto-foto administrasi pemilu (C-Pleno, Si-rekap). Purposive sampling adalah

metode untuk mengidentifikasi informan. Informasi harus dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Informan termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum Belu, seperti Ketua, Sekretaris, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, staf Divisi Perencanaan Data dan Informasi, tokoh masyarakat, dan anggota partai yang mengetahui tentang keterlibatan masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024.

Observasi langsung, fokus grup diskusi (FGD), dokumentasi, wawancara mendalam, dan rekaman arsip adalah metode pengumpulan data. Dokumentasi berasal dari dokumen administratif serta foto dan video. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai informan. Di Kantor KPU Belu, observasi langsung dilakukan, dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada 2024 dilakukan dengan para informan.

Autentikasi data diuji dengan metode berikut: a) Kepercayaan (Derajat Kepercayaan) dievaluasi melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi (Derajat triangulasi sumber, teknik, triangulasi kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member-check; b) Transferability (Derajat Keteralihan), c) Dependability (Derajat Ketergantungan), dan d) Kepastian (Derajat Kepastian).(Afiyanti, 2008).

Untuk memudahkan tahap analisis, pengolahan data melibatkan pengecekan kebenaran, penyusunan, pelaksanaan penyandian (coding), klasifikasi, dan koreksi jawaban wawancara yang tidak jelas.(Mudjia Rahardjo, 2017)

Teknik analisis data adalah analisis deskriptif berupa uraian tentang penyebab menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2024 serta rekomendasi yang perlu dilakukan oleh KPD Belu dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (konfirmasi) .(Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Hotel Nusantara Dua-Atambua Jumat, 21 Februari 2025 dengan tema “*Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu*” dihadiri sejumlah undangan yang terdiri dari Kapolres Belu, Dandim 1605 Belu, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, Kabag Kesbangpol Kabupaten Belu, Ketua dan Anggota Bawaslu Belu, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Belu, Akademisi, Pimpinan Ormas se-

Kabupaten Belu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Insan Pers yang banyak membahas seputaran masalah penurunan partisipasi pemilih di Kabupaten Belu.



Gambar 2. Para Komisioner KPU BELU



Gambar 3. Selesai Diskusi & Presentasi Hasil FGD

Dalam FGD tersebut didiskusikan beberapa hal serius terkait penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2024. KPU Belu telah berupaya melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa dan kecamatan namun hasilnya belum memuaskan. Data yang dirilis oleh KPU Belu saat FGD hanya mencapai 63 % atau sekitar \pm 59.600 DPT tidak memberikan hak suaranya. Hasil FGD menyimpulkan beberapa fenomena sosial dan budaya yang jika tidak ditanggapi serius oleh pemerintah daerah, KPU Belu dan stakeholder

terkait maka akan menjadi permasalahan dalam dinamika perpolitikan dan dinamika pemerintahan dimana jika partisipasi politik Masyarakat Belu menurun maka dikhawatirkan setiap kebijakan pemerintah yang diambil akan mengesampingkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. (Thahir, 2019).

Informasi yang disampaikan perwakilan dari Dukcapil Belu harus menjadi perhatian serius bahwa sebagian besar warga masyarakat desa terutama desa-desa terpencil dan terisolasi sangat sulit atau enggan mengurus dokumen KTP karena akses yang sulit dan ketiadaan biaya operasional untuk bisa mengurus KTP. Factor politik di desa yang kurang kondusif juga menentukan kepelikan dokumen ini. Kubuh yang menang dalam pertarungan pemilihan kepala desa akan lebih banyak memiliki akses ketimbang yang kalah. Rekomendasi yang diberikan adalah KPU Belu perlu meningkatkan kerjasama dan komunikasi dgn stakeholder terkait seperti Dukcapil, Babinsa-Babinpol untuk menggerakkan masyarakat dalam mengurus dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain sebagainya.

Permasalahan lain adalah fenomena *money politic* yang sangat mengkhawatirkan bagi Masyarakat Belu yang bisa saja menyerang siapa saja dan dari kelas sosial apa saja

terutama kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Menurut (Begouvic & Cuan, 2021) Fenomena ini menunjukkan kecurangan, ketidakjujuran, dan kebohongan dalam kampanye, bahkan membodohi pemilih dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan untuk memilih calon yang dianggap memiliki kekayaan dan akses yang lebih besar.

Memang peneliti tidak memiliki data praktik jual beli suara atau data tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*) tetapi paling tidak berdasarkan hasil FGD dengan KPU Belu, perbincangan terkait fenomena ini sangat terasa sekali dalam suasana menjelang H-3 / H-2 / H-1 pencoblosan di TPS baik pada Pilpres maupun Pilkada. Atas persoalan atau fenomena ini peneliti menyarankan agar KPU dan Bawaslu perlu sosialisasi yang intens agar masyarakat tidak terjerat *money politik*. Bentuk atau metode sosialisasi yang lebih cocok untuk kalangan masyarakat di pelosok desa dan kaum milenial seperti dikemas dalam bentuk acara hiburan yang bersifat edukasi sehingga euphoria masyarakat dipacu untuk tertarik dengan dinamika politik yang ada. Selain itu, KPU Belu juga dapat melakukan blusukan ke sekolah-sekolah tingkat atas dan kampus (*KPU Goes To School/campus*). Sosialisasi di desa pelosok dapat melibatkan pihak pemerintah desa dan para tokoh adat

karena merekalah yang mengenal masyarakatnya.

Partai politik pun perlu memainkan peran mereka secara maksimal seperti yang disarankan oleh (Intani, 2023) dalam hasil penelitiannya bahwa partai politik yang ada di daerah-daerah perlu memaksimalkan anggaran kampanye sehingga euphoria masyarakat terhadap parpol dapat meningkat. Masyarakat akan cenderung mengikuti kampanye apabila diberi “bonus” lebih. Kondisi Masyarakat Belu yang rata-rata adalah kelas menengah ke bawah akan cenderung merapat ke partai-partai yang memiliki sumber daya modal yang kuat.

Persoalan lain adalah kelompok disabilitas yang usianya telah memenuhi syarat untuk memilih namun kurang mendapatkan pelayanan dalam mengurus dokumen kepemilikan seperti KTP/KK/SIM. Para disabilitas ini tidak digotong ke TPS oleh keluarganya. Partisipasi kaum difabel ini sangat kecil dimana bisa diamati dari respon mereka tentang calon politikus yang berkampanye melalui pembagian kartu identitas ataupun melalui kunjungan-kunjungan di kelompok basis keluarga inti mereka. Alasan mengapa kaum difabel kurang respon adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikutsertakan mereka dalam dinamika pemerintahan seperti rekrutmen ketenagakerjaan, pemberdayaan sosial dan pelayanan gizi gratis. Peneliti menawarkan solusi kepada KPU Belu terhadap persoalan

ini adalah perlunya anggaran khusus bagi kaum difabel seperti sosialisasi khusus dan rekomendasi pemerintah daerah untuk memperbanyak bantuan fasilitas umum dan pelatihan pemberdayaan sehingga mereka dapat terlibat dalam dunia kerja UMKM.

Para stakeholder perlu bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi politik mengingat jumlah DPT yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Belu sebesar 37 % atau sekitar \pm 59.600 orang. Partisipasi yang rendah ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemilu sebelumnya (Pemilu Tahun 2019) dimana keterwakilan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam kontestasi politik sangat rendah (hanya didominasi oleh kaum elit yang memiliki banyak modal) dan sikap apatis masyarakat yang tinggi karena tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan atau selalu menjadi obyek politik. Gugatan hasil pemilu Bupati Belu Tahun 2024 (Simon Selly, 2025) adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap partisipasi pemilih yang rendah dimana calon petahana kalah telak karena banyak pendukungnya golput. Selain itu hampir setiap saat terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat pendukung dengan kelompok lawan politik (saling ejek) di media sosial (facebook – Belu Bebas Bicara)

Para stakeholder pun juga perlu mengimplementasikan teori Myron Weyner (Efriza, 2017) tentang upaya

memperluas partisipasi politik masyarakat dengan cara yang pertama; Modernisasi metode sosialisasi melalui media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, Snacvideo dsbg) sebagai sarana komunikasi yang bisa menyentuh kaum muda dan kelompok masyarakat terisolasi.

Kedua; Perubahan Struktur Kelas yaitu bahwa perlunya diberikan kesempatan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk juga bisa mencalonkan diri menjadi kandidat politik dan diikutkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kesempatan kelas sosial berubah posisi sosialnya dapat terjadi secara mudah.

Ketiga; Pengaruh komunikasi massa modern dan intelektual. Dalam hal ini kaum intelektual di Belu yang jumlahnya tidak sebanding dengan masyarakat awam perlu menyebarkan egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.

Keempat; Konflik antar kelompok-kelompok pimpinan politik dalam memperebutkan kekuasaan perlu melibatkan masyarakat luas/gerakan sosial yang deras yang berasal dari kaum tertinggal sehingga kelas menengah ke bawah semakin banyak keluar dan menunjukkan partisipasi mereka ke public secara terbuka.

Kelima; Sangat luasnya keterlibatan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Pemerintah perlu blusukan ke tengah-tengah persoalan dan kehidupan masyarakat bawah agar dapat memastikan mereka terlibat dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dilaksanakan tidak salah sasaran.

KESIMPULAN

Dampak Penurunan Partisipasi yaitu Krisis Legitimasi; Tingginya angka golput (tidak menggunakan hak suara) dapat mengancam legitimasi hasil pemilihan. Jika partisipasi tetap rendah, hasil Pilkada dapat dipandang tidak mewakili kehendak rakyat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial.

Kualitas Demokrasi Terancam; Penurunan partisipasi pemilih dapat mencerminkan menurunnya kualitas demokrasi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik dan kandidat dapat mengarah pada apatisisme politik yang lebih luas, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak berarti dalam perubahan kebijakan.

Evaluasi Sistem Pemilu; Rendahnya partisipasi ini mendorong perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pemilu, termasuk kemungkinan penyesuaian dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa depan. KPU dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan pemilih di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, D. (2024). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indeks Partisipasi Pemilu 2024. *Book*. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenModul/Dokumen-Modul-1107WIB171627.pdf>
- Afiyanti, Y. (2008). Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137–141. <https://doi.org/https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212>
- Arini, N. (2024). CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH. *BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN KAJIAN*, Vol. XVI,. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1UdSed8ZnGwIA8qvLQwx.;;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1742269599/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fberkas.dpr.go.id%2Fpusaka%2Ffiles%2Finfo_singkat%2FInfo%2520Singkat-XVI-23-I-P3DI-Desember-2024-2343.pdf/RK=2/RS=f
- Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2>

- 451
- Belu, B. K. (2023). *Kabupaten Belu dalam Angka Tahun 2023*. <https://belukab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/44b61777121a7526bdccc764/kabupaten-belu-dalam-angka-2024.html>
- Efriza, Y. R. &. (2017). *Handbook Sistem Politik Indonesia- Menjelajahi Teori & Praktik*. Intrans Publishing.
- Fadillah, B. D. M. (2024). Analisis Penurunan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024. <https://www.kompasiana.com/oyfadillah4107/67581e11c925c4613f0af032/analisis-penurunan-partisipasi-politik-dalam-pilkada-2024>
- Hutama, M. R. G., Solihah, R., & Manan, F. (2021). Dilema Penggunaan Figur Sentral: Antara Idealisme dan Kebutuhan bagi Partai Solidaritas Indonesia. *Polistaat*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4353>
- Intani. (2023). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 1–13. [https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/755/865](https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/755%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/755/865)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis. Book*, 381.
- Mudjia Rahardjo. (2017). STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. In *Journal of Personality and Social Psychology* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Muh Afit Khomsani, D. (2024). *STRATEGI PEMANTAUAN PILKADA TAHUN 2024*. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenModul/Dokumen-Modul-1909WIB112023.pdf>
- Nastitie, D. P. (2024, November 27). *KPU: Pilkada Susulan akibat Bencana Alam Terbanyak di Sumatera Utara*. <https://www.kompas.id/artikel/kpu-pilkada-susulan-akibat-bencana-alam-terbanyak-di-sumatera-utara>
- Prasetyo, D. (2014). PERSEPSI MASYAKARAT DKI JAKARTA TERHADAP FIGUR DAN KOMUNIKASI POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK). *Jurnal POLITIKA*, 5(2).

- Rahmiyati Mii, et al. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 3(2), 144. 2024-turun-dibanding-pemilu-2019
- Rastami, M. . I. H., & Halking. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 2(1), 136–143.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201.
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Simon Selly, Y. B. (2025). Sengketa Pilkada Belu, MK Tolak Gugatan Taolin-Yulianus. *Detik Bali*.
<https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7793923/sengketa-pilkada-belu-mk-tolak-gugatan-taolin-yulianus>
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–12.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Yesidora, A. (2024). KPU: Partisipasi Pemilih di Pilpres 2024 Turun Dibanding Pemilu 2019. *Katadata.Co.Id*, 56, 1.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/66014a53d65ca/kpu-partisipasi-pemilih-di-pilpres->